



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Fungsi Pemprov DKI Jakarta dalam Mengatasi Permasalahan Kampung Bayam Tahun 2024

Rayhan Azali¹, Jajang Sutisna², Yayan Nuryanto³

¹Padjajaran University, Jakarta, Indonesia, rayhan20007@mail.unpad.ac.id

²Padjajaran University, Sumedang, Indonesia, fisip.unpad@gmail.com

³Padjajaran University, Cimahi, Indonesia, fisip.unpad@gmail.com

Corresponding Author: rayhan20007@mail.unpad.ac.id¹

Abstract: *Many polemics occurred after the stadium was built, one of which was the problem that befell the residents of Kampung Bayam, where the residents of Kampung Bayam were residents who lived in temporary housing as a result of the eviction carried out by PT JakPro because residents were occupying the HPPO illegally. The residents of Kampung Bayam who lived in the HPPO received "unfair" treatment from JakPro as the person responsible for building the JIS stadium. Based on the cases resolved, the author is interested in writing an article entitled "The Function of Services and Development of the Jakarta Provincial Government for the Residents of Kampung Bayam due to the Construction of the Jakarta International Stadium in 2018". The purpose of writing this article itself is to describe the function of the Jakarta provincial government in relocating the residents of Kampung Bayam. Those affected by the construction of the Jakarta International Stadium can be seen from the essential functions of government as stated by Ryaas Rasyid, namely the service function and development function. The method used in this research is a descriptive qualitative research method with literature study and field study. To collect data for this research, the researcher used documentation, interviews and observation techniques. The results that researchers got from this research are, firstly regarding service functions, the Jakarta provincial government has provided primary services such as water and electricity services, after that board services by providing residence permits in Nagrak flats in North Jakarta, then social assistance services have also been provided. given to the residents of Kampung Bayam. Next, regarding the development function, the provincial government has not yet built any infrastructure for the residents of Kampung Bayam, but PT JakPro with the Jakarta provincial government has built an MSME center and hydroponic garden in Nagrak flats to help the economic conditions of Kampung Bayam residents by increasing income. per capita them.*

Keyword: *Government, Government Function, Jakarta Provincial Government, Kampung Bayam, PT JakPro,*

Abstrak: Banyak polemik yang terjadi pasca stadion dibangun, salah satunya adalah permasalahan yang menimpa warga Kampung Bayam, dimana warga Kampung Bayam merupakan warga yang tinggal di hunian sementara akibat penggusuran yang dilakukan oleh PT JakPro karena warga menempati HPPO secara ilegal. Warga Kampung Bayam yang tinggal di HPPO tersebut mendapatkan perlakuan yang “tidak adil” dari JakPro selaku penanggung jawab pembangunan stadion JIS. Berdasarkan kasus-kasus yang terselesaikan, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel dengan judul “Fungsi Pelayanan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bagi Warga Kampung Bayam Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium Tahun 2018”. Tujuan dari penulisan artikel ini sendiri adalah untuk mendeskripsikan fungsi pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi warga Kampung Bayam. Mereka yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium dapat dilihat dari fungsi esensial pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah pertama mengenai fungsi pelayanan, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan primer seperti pelayanan air dan listrik, setelah itu pelayanan papan dengan memberikan izin tinggal di rumah susun Nagrak Jakarta Utara, kemudian juga telah diberikan layanan bantuan sosial kepada warga Kampung Bayam. Berikutnya mengenai fungsi pembangunan, pemerintah provinsi belum membangun sarana prasarana apapun bagi warga Kampung Bayam, namun PT JakPro bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membangun sentra UMKM dan kebun hidroponik di rumah susun Nagrak untuk membantu kondisi perekonomian warga Kampung Bayam dengan cara meningkatkan pendapatan per kapita mereka.

Kata kunci: Pemerintah, Fungsi Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kampung Bayam, PT JakPro,

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Gubernur Jakarta yang baru, Anies Baswedan, mencanangkan kepada publik akan membangun stadion bertaraf internasional yang diberi nama Jakarta International Stadium (JIS), dan kemudian pada tahun 2019 JIS mulai dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menugaskan Propertindo (Jakpro) untuk menggarap proyek Pembangunan JIS. 3 Tahun berlalu dan JIS akhirnya diresmikan pada tanggal 19 April 2022 oleh Gubernur Anies Baswedan.

Stadion Internasional Jakarta dibangun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Wilayah Perkotaan, di mana kedua peraturan ini mengatur tentang pembangunan prasarana olahraga dan mengatur kawasan untuk prasarana olahraga. Kemudian dasar hukum penugasan kepada JakPro untuk membangun stadion JIS adalah Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu, yang berisi penugasan kepada PT JakPro untuk membangun Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) di wilayah kota Jakarta Utara.

Pembangunan Stadion JIS akhirnya rampung pada tahun 2022 dan terus beroperasi hingga saat ini. Pada tahun 2024, berbagai kegiatan seperti pertandingan sepak bola dan konser musik telah digelar di stadion ini, yang menjadikan Jakarta International Stadium sebagai salah satu stadion bertaraf internasional di Indonesia. Namun, pasca pembangunan Jakarta International Stadium muncul permasalahan, yakni permasalahan yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Kampung Bayam di kawasan Tanjung Priok. Memang, dalam

membangun infrastruktur yang menghabiskan anggaran besar tersebut tidak lepas dari dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kampung Bayam sendiri merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Jakarta Utara, tepatnya di titik dibangunnya Jakarta International Stadium. Kawasan Kampung Bayam sendiri dikelilingi oleh rel kereta api, dan mayoritas warga Kampung Bayam bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, nama Kampung Bayam sendiri tidak didapatkan secara cuma-cuma karena salah satu tanaman mereka adalah daun bayam. Penggusuran kawasan kampung bayam untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), memberikan dampak berupa dampak sosial dan dampak ekonomi, banyak warga yang kehilangan penghasilan karena penggusuran tersebut menghabiskan lahan pertanian mereka dan jika dilihat dari dampak sosial, banyak warga yang kehilangan tempat tinggal sehingga berdampak pada kehidupan sosial mereka.

Dari permasalahan diatas, terdapat permasalahan pokok yang menimpa warga Desa Bayam, diantaranya:

1. Sulitnya mendapatkan listrik dan air bersih, sehingga untuk kegiatan sehari-hari warga Desa Bayam harus menggunakan air keruh yang harus disaring setiap hari untuk keperluan makan, masak, mencuci, dan mandi.
2. Dari 642 keluarga warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Stadion Internasional Jakarta, sebanyak 40 keluarga memilih untuk tinggal secara ilegal di Kampung Bayam atau HPPO. Warga yang terpaksa tinggal di rusun bayam menamakan diri mereka sebagai komunitas kelompok tani Kampung Bayam, sedangkan sisanya tinggal di rusun nagrak dan tinggal di wilayah lain dengan menggunakan uang ganti rugi yang diberikan oleh PT JakPro.

Maka dari permasalahan diatas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi dampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) terhadap warga Kampung Bayam dilihat dari aspek pelayanan dan pembangunan.

METODE

Pengertian fungsi pemerintahan sendiri ditinjau dari fungsi pelayanan dikemukakan oleh Ryaas Rasyid bahwa pemerintahan akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat (Rasyid, 1997). Rasyid dalam bukunya yang berjudul Makna Pemerintahan Ditinjau dari Etika dan Kepemimpinan menjelaskan peran pemerintahan mengacu pada tugas dan fungsi pemerintahan yang meliputi tiga hal, yaitu fungsi pelayanan publik, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Dalam hal penanggulangan dampak penggusuran warga Kampung Bayam, pemerintah provinsi DKI Jakarta melaksanakan tiga fungsi pemerintahan, antara lain.

Ryaas Rasyid mengemukakan beberapa prinsip penting yang harus dimiliki oleh fungsi pelayanan seperti suatu pelayanan harus memiliki prinsip efisiensi seperti menghemat waktu, kemudian prinsip efektivitas seperti pelayanan harus memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, kemudian prinsip partisipasi seperti masyarakat dilibatkan dalam pemberian pelayanan, dan prinsip akuntabilitas dimana informasi tentang pelayanan harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana fungsi pelayanan berjalan dengan baik, penulis menggunakan indikator-indikator pelayanan yang dikemukakan oleh Moenir dalam bukunya yang berjudul, "Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia". Dalam bukunya tersebut ia merangkum beberapa indikator yang relevan dengan fungsi pelayanan fungsi pemerintahan Ryaas Rasyid, antara lain:

1. Prosedur: Suatu pelayanan harus memiliki prosedur dan petunjuk yang jelas dan mudah dipahami, sehingga pelayanan yang dilakukan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Kecepatan: Waktu penyelesaian layanan harus efisien, sehingga orang tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.

3. Keadilan: Layanan harus diberikan secara adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.
4. Keterbukaan: Informasi tentang layanan harus mudah diakses atau transparan. Contohnya seperti biaya layanan
5. Kejelasan: Informasi yang diberikan kepada publik harus jelas, tidak boleh ada ambiguitas. (Moenir, 2006)

Menurut Ryaas Rasyid dalam bukunya yang berjudul “Makna Pemerintahan (Tinjauan Etika dan Kepemimpinan)”, fungsi pembangunan difokuskan pada peningkatan keberlanjutan masyarakat melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur. Fungsi pembangunan memiliki tujuan utama yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana pemerintah memiliki tugas penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Fungsi pembangunan menurut Ryaas Rasyid memiliki tujuan utama yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan di sini bukan hanya pembangunan yang membangun infrastruktur seperti jembatan dan gedung-gedung tinggi saja, tetapi juga pembangunan sosial, ekonomi, dan manusia.

Dari pemahaman Ryaas Rasyid tentang fungsi pembangunan, penulis merangkumnya menjadi beberapa indikator, diantaranya:

- a. Pembangunan Ekonomi: Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan produktivitas masyarakat. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator pembangunan ekonomi adalah peningkatan PDB dan pendapatan per kapita. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, tugas pemerintah adalah menciptakan iklim ekonomi yang baik bagi masyarakat dan mendukung segala kegiatan ekonomi yang mendukung masyarakat.
- b. Pembangunan Sosial: Pembangunan sosial berfokus pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, meliputi aspek-aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Indikator utama pembangunan sosial adalah peningkatan harapan hidup dan angka melek huruf, sehingga pembangunan sosial merupakan tugas pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang dapat mendukung hal tersebut seperti menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan menciptakan pusat-pusat pendidikan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, guna menciptakan mutu hidup dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, pemerintah harus mampu mengiringi proses pembangunan dengan proses pemberdayaan dan pelayanan guna mewujudkan masyarakat yang mandiri di samping memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2016), metodologi kualitatif merupakan suatu tahap penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami, kemudian menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen utama, kemudian pengumpulan data dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelayanan terhadap warga Kampung Bayam.

Bentuk layanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan PT JakPro, diantaranya yang pertama adalah pemberian kartu bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar bagi seluruh warga Kampung Bayam. Kartu Jakarta Pintar merupakan program bantuan sosial

yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk membantu warga Jakarta yang kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan yang layak. Bantuan yang diberikan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup. Landasan hukum program KJP ini berasal dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar. Isi peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan KJP beserta mekanisme penyaluran, pengawasan, syarat penerima manfaat, dan termasuk jenis bantuannya. Kartu Jakarta Pintar memiliki anggaran yang bersumber dari APBD DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan disalurkan melalui Bank DKI. Uniknya KJP ini memiliki tiga jenis, yaitu:

1. Bantuan KJP Plus diberikan kepada siswa yang terdaftar pada keluarga kurang mampu di wilayah DKI Jakarta
2. Bantuan KJP Plus Tahap 2 diberikan kepada siswa yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan KJP Plus
3. Kartu Unggulan Mahasiswa Jakarta Berlaku bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di wilayah Jakarta.

Manfaat yang didapatkan oleh penerima KJP tidak jauh berbeda dengan KIP, siswa mendapatkan biaya pendidikan untuk membayar uang sekolah setiap bulannya (untuk sekolah swasta), kemudian juga mendapatkan biaya hidup. Untuk kasus Kampung Bayam sendiri, warga yang memiliki anak usia sekolah akan langsung mendapatkan Kartu Jakarta Pintar tanpa melalui proses seleksi terlebih dahulu, Berikutnya adalah Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia. Kartu ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga lanjut usia. Warga lanjut usia yang mendapatkan bantuan ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan. Sasaran dari program KLJ ini adalah para lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan atau para lanjut usia yang berpenghasilan sangat kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, para lanjut usia yang mengalami gangguan fisik maupun mental juga mendapatkan bantuan ini, termasuk warga Kampung Bayam, warga Kampung Bayam yang sudah berusia di atas 60 tahun langsung mendapatkan bantuan ini.

Layanan sosial selanjutnya adalah Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang merupakan salah satu program layanan sosial Jakarta yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mencegah penyandang disabilitas terkena guncangan sosial, membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan kebutuhan dasar, memberikan harkat dan kesejahteraan kepada penyandang disabilitas. Kartu selanjutnya adalah Kartu Anak Jakarta yang diperuntukkan bagi anak usia 0-6 tahun. Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak guna mencegah terjadinya stunting, dengan adanya kartu ini diharapkan warga yang mendapatkan kartu ini dapat membeli nutrisi dasar bagi anak di usia dini seperti susu dan makanan bergizi lainnya. Kartu Anak Jakarta diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp300.000 per bulan. Selain manfaat yang sudah disebutkan, penerima KAJ juga berhak membeli bahan pangan dengan harga murah (subsidi), warga yang memiliki KAJ, otomatis terdaftar sebagai anggota JakGrosir (pasar pangan di Jakarta yang menjual bahan pangan dengan harga murah khusus bagi pemegang kartu bantuan sosial). Bantuan selanjutnya adalah bantuan layanan kesehatan berupa Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program Kartu Jakarta Sehat sudah tidak berlaku lagi di Jakarta dan terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun kartu tersebut masih bisa digunakan di fasilitas kesehatan yang masih menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi warga Jakarta yang tidak mampu tetap bisa menggunakan KJS-nya.

Kedua, adanya layanan bus gratis yang mengantar warga Kampung Bayam dari Rusun Nagrak menuju sekolah-sekolah terdekat. Bus sekolah ini disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan akses transportasi bagi para pelajar di wilayah Jakarta secara gratis. Bus sekolah ini dirilis berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 330 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Sekolah. Bus sekolah tersebut melayani keberangkatan pada pagi hari, mulai pukul 05.30 -07.00 WIB, hingga malam hari pukul 17.00 - 18.30 WIB. Bus sekolah menjadi jawaban atas alasan sebagian warga Kampung Bayam tidak perlu takut dengan masalah jarak dan biaya kendaraan.

Ketiga, pelayanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelayanan yaitu, memberikan izin tinggal di rumah susun Nagrak secara cuma-cuma kepada warga Kampung Bayam. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Nagrak merupakan kompleks rumah susun yang berada di Jakarta Utara. Rumah susun ini dibangun hanya untuk masyarakat Jakarta yang berpenghasilan rendah. Pada tahun 2019, saat JIS mulai dibangun, masalah virus yang bernama virus COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 untuk merespon pandemi COVID-19 di Jakarta, yang mana salah satu isi Peraturan Gubernur tersebut adalah mengurangi retribusi daerah atau meniadakan saksi administratif bagi wajib retribusi yang terdampak bencana nasional pandemi COVID-19. Termasuk di dalamnya biaya rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Saat pembangunan Jakarta International Stadium berlangsung, tepatnya pada tahun 2019, warga Kampung Bayam diberikan izin untuk tinggal di Rusun Nagrak secara gratis, bahkan warga Kampung Bayam menjadi warga pertama yang menempati Rusun Nagrak karena bertepatan dengan diresmikannya Rusun Nagrak pada tahun 2019 yang pada akhirnya pada tahun 2021 Rusun Nagrak ini difungsikan sebagai tempat isolasi COVID-19.

Keempat, bentuk layanan terakhir adalah pemberian air dan listrik gratis kepada warga Kampung Bayam yang masih tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol, Jakarta Utara. Warga yang tinggal di hunian sementara sejak diresmikannya Kampung Susun Bayam (KSB), sudah ditawarkan untuk tinggal di Rusun Nagrak, namun karena kendala lokasi yang jauh dan lingkungan ekonomi yang kurang mendukung, akhirnya hingga saat ini per Juli 2024, sebanyak 35 warga Kampung Bayam masih tinggal di hunian sementara yang kondisinya sudah tidak layak. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak begitu saja menelantarkan mereka di hunian sementara tersebut, namun Pemprov bersama JakPro tetap memberikan layanan berupa air dan listrik gratis hingga Rusun Yos Sudarso Tanjung Priok di Jakarta Utara rampung, kemudian fasilitas kesehatan dan juga pendidikan seperti di Rusun Nagrak berupa kartu sosial tersebut di atas.

Untuk mengukur keberhasilan fungsi pelayanan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau JakPro, diperlukan indikator untuk mengukurnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan indikator pelayanan publik yang dikemukakan oleh Moenir dalam bukunya yang berjudul, "Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia." Dalam buku yang ditulis oleh Moenir mengenai topik manajemen pelayanan publik di Indonesia. Dalam buku yang ditulis oleh Moenir pada tahun 2006 tersebut, disimpulkan bahwa terdapat lima indikator pelayanan, yaitu prosedur, kecepatan, keadilan, keterbukaan, dan kejelasan.

Pertama jika dilihat dari segi tata cara pelayanan, dimana tata cara pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan publik harus memiliki kejelasan, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit prosesnya sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan, contoh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait tata cara tersebut adalah dengan dikeluarkannya layanan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, dimana warga kelurahan bayam yang terkena dampak pembangunan Stadion JIS diprioritaskan dalam pelayanan tersebut sehingga proses untuk mendapatkan kedua kartu tersebut tidak berbelit-belit, kemudian kejelasan pemberian layanan tersebut sangat jelas dan

mudah dipahami. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kartu tersebut efektif digunakan oleh seluruh masyarakat kelurahan bayam Rusun Nagrak.

Berikutnya adalah indikator kecepatan pelayanan, dimana kecepatan pelayanan merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat yang efisien, sehingga masyarakat tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan pelayanan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pelayanan, tidak pernah lama dalam melaksanakan proses, misalnya saja masyarakat Kampung Bayam ketika tinggal sementara di Hunian Sementara (STS) langsung mendapatkan pelayanan air dan listrik gratis ketika sudah sampai di Hunian Sementara di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara, kemudian warga Kampung Bayam yang tinggal di Rusun Sementara Nagrak juga langsung mendapatkan izin untuk tinggal langsung di Rusun Sementara tersebut tanpa harus menunggu berhari-hari.

Indikator ketiga, yakni keterbukaan layanan, di mana indikator ini menjelaskan bahwa informasi mengenai layanan publik harus mudah diakses dan memiliki transparansi. Mudah diakses juga berarti masyarakat dari semua lapisan masyarakat harus mengetahui jenis layanan apa saja yang tersedia, cara mengaksesnya, persyaratannya, dan hal-hal detail lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal keterbukaan informasi layanan publik memiliki banyak portal informasi yang memuat informasi mengenai bantuan pemerintah yang sedang berjalan. Informasi yang tersedia tersebut dapat diakses secara daring, maupun luring, sehingga berbagai lapisan masyarakat dari muda hingga tua dapat mengakses informasi tersebut. Informasi layanan daring tersebut dapat diakses pada situs web pemerintah provinsi DKI Jakarta di Jakarta.go.id/. Ketika mengakses situs web resmi pemerintah provinsi, masyarakat dapat mengklik tab informasi dan layanan, kemudian masuk ke tab layanan warga, dan di sana terdapat berbagai informasi mulai dari layanan pendidikan, hingga layanan bantuan stunting. Selain situs web Jakarta.go.id, terdapat pula aplikasi seluler yang bernama aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yaitu aplikasi resmi yang dibuat langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memuat informasi mengenai layanan publik seperti rute angkutan bus sekolah, informasi layanan kesehatan, dan berbagai informasi lainnya. Untuk informasi offline, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu pusat pelayanan publik terpadu yang berisi berbagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik dalam satu tempat, sehingga masyarakat Jakarta tidak perlu mendatangi banyak tempat untuk mengurus administrasi ke berbagai instansi. Selain Mal Pelayanan Publik, ada PTSP Goes To Mall yaitu pusat pelayanan yang berada di pusat perbelanjaan seperti mall, biasanya perizinan di pusat perbelanjaan melayani layanan samsat. Adanya pusat pelayanan online dapat memudahkan generasi muda dalam mengakses informasi secara terbuka dan transparan, sedangkan pusat pelayanan offline sangat membantu bagi generasi yang belum melek teknologi sehingga informasi layanan dapat diperoleh dengan mudah pula.

Indikator selanjutnya adalah keadilan pelayanan, dimana keadilan pelayanan merupakan suatu sistem pelayanan yang harus diberikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa memandang golongan dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pelayanan selalu mengutamakan masyarakat prasejahtera terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan berbagai persyaratan pelayanan masyarakat yang selalu mengutamakan masyarakat prasejahtera. Hampir seluruh layanan bantuan seperti kesehatan, pangan, pendidikan, dan perumahan gratis hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Indikator terakhir, adalah indikator kejelasan, dimana indikator ini memberikan definisi bahwa, sebuah informasi pelayanan harus mudah dipahami, jelas, dan tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Indikator ini menegaskan bahwa sebuah sistem pelayanan tidak boleh ambigu dalam pelaksanaan dan persyaratannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan informasi mengenai berbagai layanan, tidak pernah meninggalkan hal-hal yang kecil sekalipun, misalnya pada situs resmi pemerintah provinsi, informasi layanan yang tersedia menyediakan informasi mulai dari yang penting hingga hal-hal yang sangat kecil,

seperti dasar hukum dikeluarkannya layanan tersebut hingga manfaat yang diperoleh dalam layanan tersebut.

Fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pembangunan terhadap warga Kampung Bayam

Fungsi pembangunan meliputi tujuan yang luas yaitu mencapai kemajuan sosial dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perlu diciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi sehingga mendorong inovasi dan memastikan pemerataan kekayaan dan kesempatan. PT Jakarta Propertindo pasca membangun Jakarta International Stadium sebenarnya tidak memiliki rencana untuk membangun infrastruktur apa pun bagi warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Namun, pada tahun 2022 setelah diresmikannya Kampung Bayam oleh Gubernur Anies Baswedan, beliau menyatakan bahwa Kampung Bayam akan dibangun untuk mendukung kemajuan JIS. Namun, hingga saat ini warga kampung bayam belum diberikan kunci untuk tinggal di kampung bayam, melainkan hanya diberikan surat keputusan yang menunjukkan bahwa mereka adalah calon warga kampung bayam, yang dianggap oleh warga kampung bayam atau lebih tepatnya masyarakat petani bayam sebagai tanda bahwa mereka berhak untuk tinggal di kampung bayam.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejatinya telah menyediakan tempat tinggal bagi warga Kampung Bayam yang direlokasi akibat pembangunan Jakarta International Stadium, tepatnya di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Timur, sebagian warga yang disebut warga 'kooperatif' oleh PT Jakpro telah menempati Rusun Nagrak sejak adanya pembangunan Jakarta International Stadium, sedangkan warga yang disebut warga 'kurang kooperatif' oleh PT Jakpro memilih tinggal di hunian sementara yang mereka bangun sendiri di Jalan Tongkol, Jakarta Utara. Terkait izin tinggal di Rusun Nagrak sendiri diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta sebagai bentuk penyediaan tempat tinggal bagi warga yang terdampak relokasi.

Alasan warga tetap ingin tinggal di rumah susun bayam meskipun rumah susun nagrak telah disediakan dengan tarif yang relatif murah saat itu adalah masalah jarak dan juga masalah pekerjaan sehari-hari. Jarak antara stadion dengan rumah susun nagrak di Cilincing, Jakarta Utara sekitar 18 kilometer, yang menurut warga yang masih ingin menempati rumah susun bayam saat itu dirasa cukup jauh mengingat sekolah anak-anak mereka berada di dekat stadion. Kemudian mengenai masalah pekerjaan, karena mayoritas warga desa bayam bekerja sebagai petani, tentu mereka membutuhkan lahan yang luas untuk menunjang pekerjaannya, sedangkan di rumah susun nagrak lahannya tidak mencukupi, kemudian warga yang bekerja selain bertani juga merasa keberatan karena masalah jarak yang hampir 20 kilometer. Itulah sebabnya banyak warga desa bayam yang "tidak kooperatif" memilih tinggal di rumah susun bayam meskipun tidak mendapatkan kunci kamar, dan harus tinggal di halaman rumah susun, karena letak rumah susun yang strategis dari sekolah dan lokasi mata pencaharian mereka.

Dengan direlokasinya warga kampung susun bayam ke kawasan yang nyaman untuk ditinggali, maka kondisi psikologis warga kampung susun bayam dapat terjaga, tingkat kecemasan mereka pun akan berkurang, kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mudah dalam mengawasi warga sehingga pada tahun 2025 nanti warga kampung susun bayam sudah bisa hidup mandiri dan tidak selalu bergantung pada PT JakPro maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pembangunan, maka pengertian fungsi pembangunan menurut Ryaas Rasyid sendiri adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Pembangunan dalam konteks ini tidak selalu berarti membangun gedung yang besar atau membangun jembatan yang panjang, akan tetapi yang peneliti pahami bahwa pembangunan disini berarti membangun masyarakat yang tangguh atau membangun lingkungan ekonomi

yang bersahabat agar tercipta kesejahteraan dalam suatu masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat kampung bayam. Terselenggaranya pembangunan yang berhasil dapat menjadikan kualitas masyarakat menjadi baik, dimana masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki harapan hidup yang tinggi sesuai dengan indikator pembangunan selanjutnya.

Perlu pembuktian bahwa fungsi pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT JakPro telah berhasil. Oleh karena itu, sesuai dengan indikator pembangunan, bahwa ada dua jenis pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan pada peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan produktivitas masyarakat, indikatornya dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tugas pemerintah adalah menciptakan suasana perekonomian yang baik dan menunjang seluruh perekonomian masyarakat setempat.... Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT JakPro telah melakukan beberapa hal untuk menunjang iklim perekonomian warga desa bayam, diantaranya di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara telah membangun beberapa ruko UMKM dan urban farming untuk menunjang perekonomian warga desa bayam di Rusun Nagrak, Cilincing. Dengan dibangunnya ruko-ruko tersebut, warga desa bayam atau warga di Rusun Nagrak tidak perlu bingung jika ingin berwirausaha dan berjualan, karena pasar terdekat ada di dalam rusun. Terkait hal tersebut, warga desa bayam merasa terbantu dari sisi finansial karena adanya ruko di dalam rusun nagrak sehingga mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli bahan pangan dan juga dengan Kartu Anak Jakarta, bahan pangan tersebut juga dapat dibeli dengan harga subsidi.

Selanjutnya, bagi warga Kampung Bayam yang tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol, Jakarta Utara, warga dibangun lahan kosong di depan hunian sementara yang berguna bagi warga untuk menjalankan mata pencaharian sehari-hari, yaitu bercocok tanam. Indikator pembangunan selanjutnya adalah pembangunan sosial, di mana pengertian pembangunan sosial adalah pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup seperti peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum.

Indikator pembangunan selanjutnya adalah pembangunan sosial, dimana pengertian pembangunan sosial adalah pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup seperti peningkatan mutu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Indikator utama untuk melihat mutu pembangunan sosial adalah angka harapan hidup yang tinggi dan angka literasi yang tinggi. Salah satu cara untuk mewujudkan angka harapan hidup yang tinggi adalah pemerintah membangun tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk menunjang kehidupan masyarakat, sedangkan untuk meningkatkan angka literasi pemerintah dapat mempermudah akses pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT JakPro dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kampung Bayam melalui pembangunan sosial telah melakukan pembangunan yang sangat membantu kehidupan warga Kampung Bayam, yang paling terlihat adalah dibangunnya penyediaan rumah susun di Rusunawa Nagrak secara gratis kepada warga Kampung Bayam. Rusunawa Nagrak saat peneliti melakukan observasi ke lapangan untuk melihat kondisi rumah susun tersebut, menurut peneliti sendiri kondisi kamar dan lingkungannya cukup nyaman untuk ditinggali.

Apalagi sesuai wacana pemerintah provinsi DKI Jakarta akan dibangun rumah susun baru pada tahun 2025 di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, dengan begitu harapan hidup masyarakat Kampung Bayam akan meningkat karena sandang, pangan, dan papan tercukupi dengan adanya tambahan subsidi. Berikutnya terkait dengan peningkatan angka literasi, salah satu cara untuk meningkatkannya adalah dengan mempermudah akses pendidikan wajib kepada anak-anak sejak usia dini, dalam hal ini kinerja paling dekat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah telah menyediakan bus sekolah untuk membantu akses pendidikan, karena sekolah wajib di Jakarta dari SD sampai SMA disubsidi oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta

atau gratis, sehingga dengan adanya bus sekolah dapat membantu mengurangi angka buta huruf di masyarakat kampung Bayam karena adanya pengurangan biaya pendidikan tambahan. Pembangunan sesuai dengan pembahasan di atas tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur saja tetapi pembangunan seperti membangun iklim ekonomi yang baik di Rusunawa Nagrak dengan membuat ruko-ruko UMKM, membangun lahan pertanian perkotaan, dan membangun jalur bus sekolah juga merupakan fungsi pembangunan. Program-program pembangunan di atas, berdasarkan pengamatan penulis di Rusunawa Nagrak, disambut baik oleh para penghuni di sana dan menurut Unit Pengelola Rusunawa di sana, beliau menyampaikan melalui Ibu Retno bahwa para penghuni di sana diberikan pelatihan yang baik sesuai dengan keinginan mereka, dan ruko-ruko yang tersedia di sana semuanya dimanfaatkan.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan dan analisis data kualitatif terkait fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap warga Kampung Bayam dapat disimpulkan bahwa terkait fungsi pelayanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT JakPro tidak memberikan fasilitas pelayanan kepada warga Kampung Bayam kecuali memberikan surat izin bagi warga Kampung Bayam yang mana surat izin tersebut juga tidak berfungsi karena warga masih belum mendapatkan kunci kamar Kampung Bayam maupun HPPO. Fungsi pelayanan baru diberikan saat warga Rusun Bayam dan PT JakPro berdamai dalam persidangan di Komnas HAM pada bulan Mei 2024, setelah itu PT JakPro memberikan pelayanan kepada warga yang tinggal di Hunian Sementara berupa air bersih dan listrik gratis. Bagi warga kampung bayam yang tinggal di Rusun Nagrak Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan bus sekolah gratis bagi warga kampung bayam yang tinggal di Rusun Nagrak, selain itu ada layanan bantuan sosial mulai dari Kartu Jakarta Pintar, Kartu Disabilitas, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Jakarta Sehat, terakhir warga kampung bayam yang tinggal di Rusun Nagrak mendapatkan layanan menginap gratis di rusun tersebut hingga bulan Agustus 2024.

Berikutnya terkait fungsi pembangunan, Pemprov DKI Jakarta membangun Rusun Nagrak sejak tahun 2019, awalnya rusun tersebut dibangun sebagai tempat karantina bagi penderita COVID-19, namun karena masih banyak unit yang kosong dan akibat adanya benturan kepentingan antara warga kampung bayam dengan PT JakPro, maka rusun tersebut diberikan kepada warga kampung bayam dengan tarif gratis. Di rusun nagrak tersebut, Pemprov DKI Jakarta bersama PT JakPro membangun beberapa ruko bagi warga disana untuk berwirausaha sekaligus membangun urban farming guna mendukung perekonomian warga di rusun nagrak, untuk PT JakPro sendiri sebenarnya tidak pernah memiliki prasarana apapun bagi warga kampung bayam, kecuali membangun rusun bayam atau HPPO yang sejatinya dibangun untuk mendukung operasional stadion JIS, karena biaya ganti rugi sudah diberikan dalam bentuk santunan. Untuk pembangunannya sendiri, Pemprov DKI Jakarta baru akan membangun rusun baru di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara pada tahun 2025.

REFERENSI

- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat (Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial)*. PT. Refika Aditama.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi research*. Andi. Yogyakarta.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik*. Gava Media.
- Haudi. (2021). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, H. (2007). *Teori administrasi publik*. Alfabeta Bandung.

- Pemerintah Provinsi Jakarta. (2024). *Laporan pembangunan Jakarta International Stadium*. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.
- Rasyid, R. (1997). *Makna pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Rasyid, R. (1996). *Ilmu pemerintahan: Konsep, teori, dan aplikasi*. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Supardi. (1994). *Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya*. PT. Rineka Cipta.